

ABSTRAKSI

Afrika Selatan merupakan negara pertama yang memasukkan istilah orientasi seksual dalam konstitusi negara pada tahun 1996 setelah terlepas dari politik pemerintahan apartheid. Hal ini kemudian membawa Afrika Selatan menginisiasi resolusi yang berjudul “*Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity*” pada tahun 2011, yang merupakan usaha pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merujuk kasus diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender melalui pengaduan laporan kekerasan. Sebagai negara dengan sebutan *Rainbow Nation* dan inisiator pada resolusi tersebut, Afrika Selatan diharapkan akan selalu turut mendukung berbagai upaya PBB dalam memberantas diskriminasi tersebut. Akan tetapi pada tahun 2016, Afrika Selatan melakukan *abstain*, yang merupakan tindakan tidak setuju namun juga tidak menolak, terhadap “*Resolution Protection Against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity*” yang mengusulkan pembentukan *Independent Expert* dalam rangka peningkatan perlindungan hak kelompok LGBT. Sikap ini dinilai problematis dan merupakan sebuah kemunduran karena dengan rekam jejak sejarah dukungan terhadap hak asasi manusia, seharusnya Afrika Selatan memilih untuk langsung setuju.

Kata Kunci: Afrika Selatan, LGBT, Hak Asasi Manusia, Negosiasi Internasional